



## Analisis Hubungan Efektivitas Subsidi Pupuk Pemerintah, Skala Dan Pola Penguasaan Lahan Petani Dengan Kemiskinan Petani Di Kabupaten Takalar

### *Analysis of the Relationship between the Effectiveness of Government Fertilizer Subsidies, Farmers' Land Tenure Scale and Patterns, and Farmer Poverty in Takalar Regency*

**Abdul Halim, Nashar**

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat,  
Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor Sumedang, Indonesia

\*Kontak penulis: [abdulhalim@ipdn.ac.id](mailto:abdulhalim@ipdn.ac.id)

#### **Abstract**

*This study aims to analyze the relationship between the effectiveness of government fertilizer subsidies, the scale and pattern of farmers' land tenure, and farmer poverty in Takalar Regency. The research is quantitative in nature, using a questionnaire as the main instrument. The sample consisted of 120 farmers, selected at random using proportionate stratified random sampling. The SPSS for Windows application was used for Spearman Rank correlation analysis. The research results indicate that all the variables studied – including the effectiveness of government fertilizer subsidies, as well as the scale and pattern of farmers' land tenure – collectively share a positive and significant relationship with farmer poverty. However, when examined individually, the variable representing the effectiveness of government fertilizer subsidies shows an insignificant relationship with farmer poverty. In general, there is a tendency for farmers classified as poor to be those who hold land only through sharecropping arrangements, possess a very small area of land (less than 0.50 hectares), and derive little effective benefit from the government fertilizer subsidies they receive. Farmers able to control a large scale of land (greater than 1.00 ha), whether through their own ownership or through a profit-sharing arrangement with others (owner-cultivator farmers), were shown to have income levels greater than IDR 475,861 per capita per month, tending to place them above the poverty line (not poor). Regulation is needed regarding land tenure under the profit-sharing pattern, in the form of a regional regulation or a regent's regulation, so that government fertilizer subsidies achieve high benefit effectiveness – particularly for farmers entitled to receive them – in order to motivate farmers to increase their production and income through optimal land use, thereby helping them avoid poverty.*

**Keywords:** *government fertilizer subsidies; scale and patterns of land tenure; profit-sharing systems; farmer poverty.*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan efektivitas subsidi pupuk pemerintah, skala dan pola penguasaan lahan petani dengan kemiskinan petani di Kabupaten Takalar. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif, dengan kuesioner sebagai instrumen utama. Besarnya sampel 120 orang petani, dipilih secara acak dengan *proportionate stratified random sampling*. Aplikasi SPSS for windows digunakan dalam analisis korelasi *Rank Spearman*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel penelitian mencakup efektivitas subsidi pupuk pemerintah, skala dan pola penguasaan lahan petani secara bersama-sama memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kemiskinan petani, namun secara parsial variabel efektivitas subsidi pupuk pemerintah memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan kemiskinan petani. Secara umum, terdapat kecenderungan petani yang tergolong miskin adalah petani yang penguasaan lahannya hanya menggunakan pola sistem bagi hasil (petani penggarap), luasannya berskala sempit

(kurang dari 0,50 ha), dan subsidi pupuk pemerintah yang diterima memiliki efektivitas manfaat yang rendah. Petani yang mampu menguasai lahan berskala luas (lebih besar dari 1,00 ha), baik milik sendiri maupun milik orang lain dengan pola sistem bagi hasil (petani pemilik penggarap), terbukti memiliki tingkat pendapatan lebih besar dari Rp 475.861 per kapita per bulan atau cenderung berada diatas garis kemiskinan (tidak miskin). Perlu adanya regulasi terkait penguasaan lahan dengan pola bagi hasil berupa peraturan daerah atau peraturan bupati agar subsidi pupuk pemerintah memiliki efektivitas manfaat yang tinggi khususnya bagi petani yang berhak menerima guna memotivasi petani untuk meningkatkan produksi dan pendapatannya melalui pemanfaatan lahan secara optimal sehingga mereka bisa terhindar dari kemiskinan.

**Kata kunci:** subsidi pupuk pemerintah; skala dan pola penguasaan lahan; sistem bagi hasil; kemiskinan petani.

## **1. Pendahuluan**

Fenomena kemiskinan masih merupakan masalah serius bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di Indonesia tahun 2025 berjumlah 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin ini, ternyata telah mengalami penurunan 17,44 persen bila dibandingkan jumlah penduduk miskin periode 10 tahun sebelumnya (tahun 2016) yang berjumlah 28,01 juta jiwa (BPS Indonesia, 2025). Distribusi penduduk miskin usia 15 tahun ke atas tahun 2023 berdasarkan lapangan pekerjaan utama berturut-turut adalah bekerja di sektor pertanian sebanyak 4,70 juta jiwa, bekerja di luar sektor pertanian sebanyak 5,03 juta jiwa, dan tidak bekerja sebanyak 7,53 juta jiwa (BPS Indonesia, 2023). Artinya, terdapat 26,54 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas memiliki sumber penghasilan utama sebagai petani.

Penduduk miskin yang kebanyakan bergantung di sektor pertanian tersebut, sebagian besar bekerja sebagai buruh serabutan di sektor pertanian tradisional, dan sebagian kecil menjadi pekerja keluarga yang tidak dibayar (Sugiyarto et al., 2016); (Tenriawaru et al., 2021). Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun petani memegang peran penting dan krusial sebagai penyedia kebutuhan pangan utama nasional, namun kesejahteraan mereka belum sepenuhnya terjamin. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan petani adalah skala kepemilikan lahan yang sempit, dimana banyak petani tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk mencapai titik impas usahatani dan memperoleh pendapatan di atas garis kemiskinan (Ginting, 2004); (Mufti & Zargustin, 2018); (Manatar et al., 2017). Menurut (Susilowati & Maulana, 2012), terdapat sekitar 76 hingga 85 persen petani padi dikategorikan sebagai petani gurem dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,50 ha, jauh di bawah standar ideal 2,00 ha yang dianggap mampu menjamin kehidupan layak.

Pola penguasaan lahan merupakan faktor lain yang tidak kalah pentingnya terkait petani miskin. Di Kabupaten Takalar, terdapat tiga pola yang umum ditemui dalam penguasaan lahan petani, yakni: (1) Pola penguasaan lahan petani pemilik, artinya petani sebagai pemilik lahan langsung menggarap sendiri lahan usahatannya; (2) Pola penguasaan lahan petani penggarap, dalam hal ini petani tidak memiliki lahan usahatani, kemudian menggarap lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan dengan pemilik lahan; serta (3) Pola penguasaan lahan petani pemilik penggarap, artinya petani pemilik menggarap sendirinya lahan usahatannya, namun karena lahannya terbatas, sehingga petani berusaha menambah luas lahan garapannya dengan cara menggarap lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil.

Pola penguasaan lahan yang dominan dipraktekkan di Kabupaten Takalar adalah pola penguasaan lahan petani pemilik penggarap. Hal ini wajar mengingat sebaran skala kepemilikan lahan petani di Kabupaten Takalar sebagian besar berskala kecil, 0,0-1,0 hektar. Distribusi kepemilikan lahan petani berturut-turut, yakni: skala 1,00-1,99 hektar berjumlah 3.629 orang (8,81 persen), skala 0,01-0,99 hektar berjumlah 30.426 orang (73,83 persen), dan tidak memiliki lahan berjumlah 7.156 orang (17,36 persen) (BPS Takalar, 2024). Kepemilikan lahan yang terbatas, atau bahkan tidak memiliki lahan sama sekali (tunakisma) menjadikan sebagian besar petani berusaha menggarap lahan milik orang lain dengan pola bagi hasil.

Beberapa kajian selama ini menunjukkan bahwa pola penguasaan lahan dengan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap cenderung merugikan petani penggarap (Faisal & Halim, 2022); (Damayanti, 2022); (Mokodongan et al., 2016). Sistem bagi hasil yang diterapkan selama ini umumnya masih mengikuti tradisi turun-temurun, dan tidak tertulis. Dalam kesepakatan bagi hasil, petani penggarap cenderung menanggung beban pembiayaan yang cukup tinggi, dan tidak sebanding dengan proporsi hasil yang diterima pada saat pembagian hasil (Halim, 2026). Kondisi ini sangat dilematis bagi petani penggarap karena posisi tawar mereka sangat lemah. Apabila petani penggarap tidak mematuhi kesepakatan tersebut, maka pemilik lahan dengan mudah mengalihkan hak garapan kepada petani penggarap yang lain.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usahatannya, petani penggarap acapkali harus meminjam uang kepada petani yang lain, atau malah meminjam uang ke tengkulak dengan bunga yang cukup tinggi. Akibatnya, petani penggarap potensial terjerat utang akibat pembebanan biaya yang tidak adil tersebut (Handayani et al., 2018); (Lubis & Indrawati, 2017). Fenomena tersebut diduga menggerus pendapatan petani sehingga pada akhirnya petani tidak mampu lagi memenuhi batas kebutuhan dasar minimum (makanan dan bukan makanan), yang diukur berdasarkan standar kemiskinan BPS yaitu Garis Kemiskinan (GK). Menurut (Khomsan et al., 2015), nilai GK berbeda antar daerah dan antar desa-kota. Nilai GK Kabupaten Takalar keadaan Desember 2025 adalah Rp 475.861/kapita/bulan (BPS Indonesia, 2025).

Sebenarnya, pemerintah telah melakukan beberapa upaya guna membantu petani terbebas dari jeratan kemiskinan, salah satunya adalah bantuan subsidi pupuk. Tujuan diadakannya subsidi pupuk adalah membantu meringankan beban pembiayaan yang ditanggung petani pada setiap musim tanam. Subsidi pupuk hanya diperuntukkan bagi petani yang terdaftar secara resmi di e-RDKK dengan luas lahan maksimal 2,0 ha. Kebijakan terbaru melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022, bahwa bantuan subsidi pupuk dibatasi hanya dua jenis pupuk yakni urea dan NPK. Pembatasan bantuan subsidi pupuk diambil karena keterbatasan anggaran negara, dalam hal ini pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 30 persen dari total kebutuhan pupuk petani (Ulfa et al., 2023).

Tantangan utama yang dihadapi terkait subsidi pupuk pemerintah adalah efektivitasnya dalam membantu meringankan beban pembiayaan petani. Penguasaan lahan pola bagi hasil, dimana pemilik lahan cenderung memberikan beban pembiayaan yang tinggi kepada petani penggarap, diduga dapat mengurangi efektivitas subsidi pupuk pemerintah. Fenomena ini penting dianalisis karena tampak adanya kontra produktif, di satu pihak pemerintah memberikan subsidi pupuk untuk meringankan beban pembiayaan petani, namun di pihak lain pemilik lahan justru memberikan beban pembiayaan yang tinggi bagi petani penggarap. Dan lebih parahnya lagi, subsidi pupuk

ini tidak diperhitungkan dan tidak dikembalikan sebagai kontribusi petani pada saat pembagian hasil. Selama ini penelitian yang menghubungkan efektivitas subsidi pupuk pemerintah dengan kemiskinan petani sebagai penerima manfaat subsidi pupuk dari pemerintah belum banyak dikaji secara mendalam.

Berdasarkan uraian diatas, salah satu fenomena yang menarik dikaji lebih jauh adalah hubungan efektivitas subsidi pupuk pemerintah, skala dan pola penguasaan lahan petani dengan tingkat kemiskinan petani. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Hubungan Efektivitas Subsidi Pupuk Pemerintah, Skala dan Pola Penguasaan Lahan Petani dengan Kemiskinan Petani di Kabupaten Takalar”.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dipilih karena dalam penelitian ini dilakukan analisis korelasi antara variabel efektivitas subsidi pupuk pemerintah, skala dan pola penguasaan lahan petani dengan kemiskinan petani di Kabupaten Takalar. Rancangan penelitian ini merupakan rancangan non-eksperimen, artinya memotret variabel penelitian secara apa adanya.

Pengumpulan data dilaksanakan dari April-Juni 2026, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Untuk memperkaya data serta memahami fenomena yang terjadi di lapangan digunakan pula lembar observasi dan dokumentasi. Mengenai pengisian kuisioner dilakukan oleh petani bersangkutan dan didampingi penyuluh pertanian setempat sesuai wilayah kerja masing-masing.

Variabel penelitian mencakup tiga variabel bebas yakni: (a) efektivitas subsidi pupuk pemerintah; (b) skala penguasaan lahan petani; dan (c) pola penguasaan lahan petani. Sementara itu, variabel terikat adalah tingkat kemiskinan petani. Adapun definisi operasional variabel penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Efektivitas subsidi pupuk pemerintah adalah kemampuan dari subsidi pupuk yang merupakan bantuan pemerintah kepada petani untuk menekan biaya produksi petani, dan meningkatkan produksi mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam penelitian ini, efektivitas subsidi pupuk dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (1) Tinggi, bila bantuan subsidi pupuk mampu menekan biaya produksi secara maksimal, sekaligus menunjang pencapaian produksi tinggi; (2) Sedang, bila bantuan subsidi pupuk mampu menekan biaya produksi secara maksimal namun belum mampu menunjang pencapaian produksi tinggi, atau sebaliknya mampu menunjang pencapaian produksi tinggi, akan tetapi belum mampu menekan biaya produksi secara maksimal; dan (3) Rendah, bila bantuan subsidi pupuk belum mampu menekan biaya produksi secara maksimal, sekaligus belum mampu menunjang pencapaian produksi tinggi.
- b) Skala penguasaan lahan didefinisikan sebagai rata-rata luas areal lahan sawah yang dikuasai oleh petani padi, baik milik sendiri maupun milik orang lain dengan sistem bagi hasil untuk 3 (tiga) musim tanam terakhir. Skala penguasaan lahan sawah petani tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (1) Skala luas, petani dengan rata-rata luas sawah yang dikuasai adalah lebih besar dari 1,00 hektar; (2) Skala menengah, petani dengan rata-rata luas lahan sawah yang dikuasai adalah 0,50-1,00 hektar; serta (3) Skala kecil, petani dengan rata-rata luas lahan sawah yang dikuasai lebih kecil dari 0,50 hektar.

- c) Pola penguasaan lahan adalah bentuk pengaturan hubungan hukum antara individu/kelompok dengan lahan, mencakup diantaranya hak milik, dan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Pola penguasaan lahan dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (1) Pola penguasaan lahan petani pemilik, petani hanya mengusahakan lahan milik sendiri; (2) Pola penguasaan lahan petani pemilik penggarap, petani mengusahakan lahan milik sendiri, dan juga mengusahakan lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil; serta (3) Pola penguasaan lahan petani penggarap, petani hanya mengusahakan lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil.
- d) Tingkat kemiskinan petani adalah tingkat ketidakmampuan petani dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum (makanan dan bukan makanan), yang diukur berdasarkan standar kemiskinan BPS yaitu Garis Kemiskinan (GK). Menurut (Khomsan et al., 2015), nilai GK berbeda antar daerah dan antar desa-kota. Nilai GK Kabupaten Takalar pada keadaan Desemberr 2025 adalah Rp 475.861/kapita/bulan (BPS Indonesia, 2025). Dalam penelitian ini, tingkat kemiskinan petani padi dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (1) Tidak Miskin, bila pendapatan bersih petani per bulan lebih besar dari 1,6 GK; (2) Rentan miskin, bila pendapatan bersih petani per bulan antara 1,0 - 1,6 GK; serta (3) Miskin, bila pendapatan bersih petani per bulan lebih kecil dari 1,0 GK.

Populasi penelitian berjumlah 29.342 orang petani mencakup seluruh petani padi yang terdaftar secara resmi sebagai penerima pupuk bersubsidi di Kabupaten Takalar. Dari jumlah populasi tersebut, sampel dipilih dengan menggunakan teknik penarikan sampel secara *proportionate stratified random sampling*, dalam hal ini berdasarkan kepadatan populasi petani padi pada setiap kecamatan di Kabupaten Takalar. Berdasarkan kepadatan populasi petani padi, maka kecamatan di Kabupaten Takalar dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori yakni: (1) kepadatan tinggi (4.987 - 7.338 orang petani), mencakup dua kecamatan yaitu Kecamatan Polongbangkeng Utara, dan Kecamatan Polongbangkeng Selatan; (2) kepadatan sedang (2.636 - 4.986 orang petani), mencakup dua kecamatan yaitu Kecamatan Mangara Bombang, dan Kecamatan Galesong; dan (3) kepadatan rendah (285 - 2.635 orang petani), mencakup enam kecamatan, yaitu Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Galesong Selatan, dan Kecamatan Galesong Utara.

Dari setiap kategori kepadatan populasi petani padi, dipilih satu kecamatan secara acak, yakni: (1) Kecamatan Polongbangkeng Utara untuk kategori kepadatan tinggi; (2) Kecamatan Galesong untuk kategori kepadatan sedang; dan (3) Kecamatan Galesong Utara untuk kategori kepadatan rendah. Selanjutnya, dari setiap kecamatan dipilih secara acak masing-masing berturut-turut: 5 kelompok tani untuk kategori kepadatan tinggi; 4 kelompok tani untuk kategori kepadatan sedang; dan 3 kelompok tani untuk kategori kepadatan rendah. Pada setiap kelompok tani masing-masing dipilih 10 orang petani secara acak, sehingga secara keseluruhan sampel penelitian ini melibatkan 120 orang petani padi sebagai responden.

Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS for windows 20.0 dengan pengkodean dan memberikan skor dari jawaban yang ada sesuai daftar pertanyaan dalam kuisisioner. Untuk data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi, dianalisis

lebih lanjut secara deskriptif untuk memperdalam data kuantitatif yang telah dianalisis sebelumnya.

Untuk menganalisis hubungan antara variabel penelitian digunakan analisis korelasi *Rank Spearman* (Martono, 2010), dengan rumus sebagai berikut:

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum b}{n(n^2 - 1)}$$

dimana:

$\rho$  = nilai korelasi *Rank Spearman*

$b$  = jumlah kuadrat selisih ranking variabel  $x$  dan  $y$  atau  $R_X - R_Y$

$n$  = jumlah sampel.

Uji signifikansi hubungan antara kedua variabel menggunakan uji  $Z$ , dengan rumus sebagai berikut:

$$Z_{hitung} = \frac{\rho}{\frac{\sqrt{1}}{(n - 1)}}$$

Bila  $Z$  hitung lebih besar  $Z$  tabel, maka hubungan  $x$  dan  $y$  adalah signifikan, namun bila  $Z$  hitung lebih kecil  $Z$  tabel, maka hubungan  $x$  dan  $y$  adalah tidak signifikan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Takalar terletak antara  $5^{\circ}30'$  –  $5^{\circ}38'$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}22'$  –  $119^{\circ}39'$  Bujur Timur, berbatasan di sebelah timur dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto, di sebelah utara dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores. Kabupaten Takalar terdiri atas 110 desa/kelurahan dan 10 kecamatan. Menurut letak geografinya, terdapat 39 desa/kelurahan berada di kawasan tepi laut, sedangkan 71 desa/kelurahan berada di wilayah bukan tepi laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Takalar adalah dataran rendah, kecuali 2 desa di Kecamatan Polombangkeng Selatan dan 2 desa Polombangkeng Utara berada di daerah ketinggian lereng/puncak. Luas Wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km<sup>2</sup>. Kecamatan Polombangkeng Utara merupakan kecamatan terluas yakni 212,25 km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Galesong Utara merupakan tersempit yakni 15,11 km<sup>2</sup>. Jarak ibukota Kabupaten Takalar dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yakni Kota Makassar sejauh 45 km (BPS Takalar, 2025a); (BPS Takalar, 2025b).

Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dibentuk berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 (LN Nomor 74 Tahun 1959) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk Kabupaten Takalar berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar sebanyak 329.997 jiwa yang terdiri atas 161.491 jiwa penduduk laki-laki dan 168.506 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Takalar tahun 2024 mencapai 582 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Galesong Utara dengan kepadatan sebesar 3.000 jiwa per km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Polombangkeng Utara sebesar 256 jiwa per km<sup>2</sup>. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,84 persen. Penduduk

usia kerja sebanyak 31,34 persen berpendidikan SMA, sebanyak 27,30 persen bekerja tenaga usaha tani, kebun, ternak, ikan, hutan dan perburuan (BPS Takalar, 2025a); (BPS Takalar, 2025b).

Usahatani yang dominan digeluti penduduk adalah usahatani padi dengan distribusi kepemilikan lahan adalah 8,81 persen skala luas (1,00-1,99 hektar), selanjutnya 73,83 persen berskala kecil (0,01-0,99 hektar), dan terdapat 17,36 persen tidak memiliki lahan sama sekali (BPS Takalar, 2024). Bagi penduduk yang tidak memiliki lahan usahatani, pada umumnya mereka menggarap lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Kondisi ini tentunya berdampak terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraan mereka. Sebenarnya, beberapa upaya pemerintah telah dilakukan untuk membantu meringankan beban pembiayaan seperti adanya subsidi pupuk. Hanya saja efektivitas subsidi pupuk dalam meningkatkan pendapatan dan menanggulangi kemiskinan belum banyak dikaji. Faktanya, menurut laporan BPS Takalar (2025), bahwa dalam periode 10 tahun terakhir di Kabupaten Takalar terdapat penurunan penduduk miskin sebesar 1,60 persen, yakni dari 9,35 persen pada tahun 2016 kemudian turun menjadi 7,75 persen pada tahun 2024.

Skala dan pola penguasaan lahan, serta efektivitas subsidi pupuk pemerintah dikaitkan dengan fenomena kemiskinan penduduk khususnya petani di Kabupaten Takalar merupakan kajian utama yang dilakukan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian diuraikan secara ringkas berikut ini.

### 3.2. Hasil Penelitian

#### 3.2.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang diamati pada penelitian ini meliputi usia adaptif terhadap teknologi, pendidikan formal, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman berusahatani, dan rata-rata produktivitas padi yang diusahakan dalam 3 (tiga) musim tanam terakhir (Tabel 1).

Tabel 1  
Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik yang Diamati

| No. | Karakteristik yang Diamati          | Distribusi |       |
|-----|-------------------------------------|------------|-------|
|     |                                     | (orang)    | (%)   |
| 1.  | Usia adaptif teknologi              |            |       |
|     | a) Tidak adaptif (40 tahun ke atas) | 109        | 90,83 |
|     | b) Adaptif (39 tahun ke bawah)      | 11         | 9,17  |
| 2.  | Pendidikan formal                   |            |       |
|     | a) S1 ( sederajat)                  | 7          | 5,83  |
|     | b) SLTP dan SLTA (sederajat)        | 84         | 70,00 |
|     | c) Tidak sekolah dan SD             | 29         | 24,17 |
| 3.  | Jumlah tanggungan keluarga (orang)  |            |       |
|     | a) 5 – 6                            | 7          | 5,83  |
|     | b) 3 – 4                            | 47         | 39,17 |
|     | c) 1 – 2                            | 66         | 55,00 |
| 4.  | Pengalaman berusahatani (tahun)     |            |       |
|     | a) 35 – 50                          | 30         | 25,00 |

| No. | Karakteristik yang Diamati         | Distribusi |       |
|-----|------------------------------------|------------|-------|
|     |                                    | (orang)    | (%)   |
| 5.  | b) 20 – 34                         | 62         | 51,67 |
|     | c) 05 – 19                         | 28         | 23,33 |
|     | Rata-rata produktivitas (t/ha GKP) |            |       |
|     | a) 6,38 – 8,23                     | 19         | 15,83 |
|     | b) 4,54 – 6,37                     | 71         | 59,17 |
|     | c) 2,70 – 4,53                     | 30         | 25,00 |

Pada Tabel 1 tampak bahwa responden kebanyakan tergolong dalam usia tidak adaptif terhadap teknologi digital berjumlah 109 orang (90,83%), sedangkan responden yang tergolong adaptif terhadap teknologi digital berjumlah 11 orang (9,17%). Pendidikan formal responden, terdiri atas jenjang pendidikan sarjana strata satu berjumlah 7 orang (5,83%), jenjang SLTP dan SLTA (sederajat) berjumlah 84 orang (70,00%), serta responden yang jenjang pendidikan SD dan tidak sekolah berjumlah 29 orang (24,17%). Karakteristik berdasarkan jumlah tanggungan keluarga adalah responden dengan jumlah tanggungan masing-masing berturut-turut 5-6 orang berjumlah 7 orang (5,83%), 3-4 orang berjumlah 47 orang (39,17%), 1-2 orang berjumlah 66 orang (55%). Sementara itu, karakteristik berdasarkan pengalaman berusahatani berturut-turut adalah 35-50 tahun berjumlah 30 orang (25%), 20-34 tahun berjumlah 62 orang (51,67%), dan 5-19 tahun berjumlah 28 orang (23,33%). Produktivitas padi berturut-turut adalah 2,70-4,53 t/ha berjumlah 30 orang (25,00%), 4,54-6,37 t/ha berjumlah 71 orang (59,17%), dan 6,38-8,23 t/ha berjumlah 19 orang (15,83%).

### 3.2.2. Distribusi Responden Berdasarkan Kategori Variabel Penelitian yang Diamati

Terdapat 4 (empat) variabel yang diamati dalam penelitian ini mencakup: (1) skala penguasaan lahan; (2) pola penguasaan lahan; (3) efektivitas subsidi pupuk pemerintah; serta (4) kemiskinan petani. Distribusi jumlah responden berdasarkan beberapa kategori variabel penelitian diamati ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2  
Distribusi Responden Berdasarkan Kategori Variabel Penelitian yang Diamati

| No | Variabel Penelitian                  | Kategori                 | Distribusi |       |
|----|--------------------------------------|--------------------------|------------|-------|
|    |                                      |                          | (orang)    | (%)   |
| 1. | Skala penguasaan lahan               | Skala luas               | 20         | 16,67 |
|    |                                      | Skala menengah           | 28         | 23,33 |
|    |                                      | Skala kecil              | 72         | 60,00 |
| 2. | Pola penguasaan lahan                | Petani pemilik penggarap | 25         | 20,83 |
|    |                                      | Petani pemilik           | 70         | 58,33 |
|    |                                      | Petani penggarap         | 25         | 20,83 |
| 3. | Efektivitas subsidi pupuk pemerintah | Tinggi                   | 45         | 37,50 |
|    |                                      | Sedang                   | 34         | 28,33 |
|    |                                      | Rendah                   | 41         | 34,17 |
| 4. | Kemiskinan petani                    | Tidak miskin             | 53         | 44,17 |
|    |                                      | Rentan miskin            | 21         | 17,50 |
|    |                                      | Miskin                   | 46         | 38,33 |

Pada Tabel 2 tampak bahwa kebanyakan responden memiliki skala penguasaan lahan dengan kategori berskala kecil (kurang dari 0,50 hektar) berjumlah 72 orang (60,00%), kategori skala menengah (0,5-1,0 hektar) berjumlah 28 orang (23,33%), dan kategori berskala luas (lebih besar dari 1,0 hektar) berjumlah 20 orang (16,67%). Pola penguasaan lahan responden yakni petani pemilik penggarap berjumlah 25 orang (20,83%), petani pemilik berjumlah 70 orang (58,33%), dan petani penggarap berjumlah 25 orang (20,83%). Efektivitas subsidi pupuk pemerintah yang tergolong tinggi berjumlah 45 orang (37,50%), sedang berjumlah 34 orang (28,33%), dan rendah berjumlah 41 orang (34,17%). Kemiskinan petani terbagi dalam tiga kategori yakni tidak miskin berjumlah 53 orang (44,17%), rentan miskin berjumlah 21 orang (17,50%), dan miskin berjumlah 46 orang (38,33%).

### 3.2.3. Hubungan Efektivitas Subsidi Pupuk Pemerintah, Skala dan Pola Penguasaan Lahan Petani Dengan Kemiskinan Petani

Hubungan efektivitas subsidi pupuk pemerintah, skala dan pola penguasaan lahan petani dengan kemiskinan petani disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3  
Hubungan Efektivitas Subsidi Pupuk Pemerintah, Skala dan Pola Penguasaan Lahan dengan Kemiskinan Petani

| No | Variabel Penelitian (X)                   | Kemiskinan Petani (Y) |        |                   |
|----|-------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------|
|    |                                           | $r_s$                 | $\rho$ | Keterangan        |
| 1. | Skala penguasaan lahan (X1)               | 0,344**               | 0,000  | Sangat signifikan |
| 2. | Pola penguasaan lahan (X2)                | 0,323**               | 0,000  | Sangat signifikan |
| 3. | Efektivitas subsidi pupuk pemerintah (X3) | 0,123 <sup>ns</sup>   | 0,182  | Non signifikan    |
| 4. | X1, X2, dan X3                            | 0,298**               | 0,001  | Sangat signifikan |

Pada Tabel 3 tampak bahwa variabel skala penguasaan lahan memiliki hubungan yang positif dan sangat signifikan dengan variabel kemiskinan petani. Nilai koefisien korelasi ( $r_s$ ) kedua variabel tersebut adalah 0,344. Nilai ini mengindikasikan terdapat kecenderungan bahwa penguasaan lahan skala kecil menjadikan petani tergolong miskin. Sebaliknya, penguasaan lahan dengan kategori skala luas cenderung menjadikan petani tidak miskin. Variabel pola penguasaan lahan memiliki hubungan yang positif dan sangat signifikan dengan variabel kemiskinan petani. Nilai koefisien korelasinya ( $r_s$ ) adalah 0,323. Ini berarti terdapat kecenderungan penguasaan lahan pola petani pemilik penggarap menjadikan petani tidak miskin, sedangkan penguasaan lahan pola petani penggarap cenderung menjadikan petani miskin.

Pada Tabel 3 juga tampak bahwa semua variabel penelitian mencakup efektivitas subsidi pupuk pemerintah, skala dan pola penguasaan lahan secara bersama-sama memiliki hubungan yang positif dan sangat signifikan dengan variabel kemiskinan petani. Nilai koefisien korelasinya ( $r_s$ ) adalah 0,298. Akan tetapi, secara parsial variabel efektivitas subsidi pupuk pemerintah memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan variabel kemiskinan petani. Terkait hal ini dapat dikemukakan bahwa penguasaan lahan berskala luas, pola penguasaan lahan petani pemilik penggarap, serta efektivitas subsidi pupuk pemerintah yang tinggi cenderung menjadikan petani tidak miskin, tetapi sebaliknya penguasaan lahan berskala kecil, pola penguasaan lahan petani penggarap,

serta efektivitas subsidi pupuk pemerintah yang rendah cenderung menjadikan petani miskin.

### **3.3. Pembahasan**

Petani dengan penguasaan lahan kebanyakan berskala kecil, kurang dari 0,50 hektar (Tabel 2) cenderung berimplikasi pada hasil produksi dan pendapatan mereka yang tidak maksimal pada setiap musim tanam. Fenomena ini menjadikan sebagian petani berada pada kondisi rentan miskin dan bahkan dapat terpuruk menjadi miskin. Sebenarnya, petani telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan produksi dan pendapatan mereka, salah satunya adalah berusaha menambah jumlah luas penguasaan lahan dengan menggarap lahan milik orang lain melalui perjanjian kerjasama sistem bagi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 79,16% petani pemilik lahan, ternyata 20,83% petani pemilik lahan ini kemudian sekaligus menggarap lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil sehingga luas lahan yang dikuasai menjadi bertambah. Menurut (César, 2024), penambahan luas penguasaan lahan dengan sistem bagi hasil ini dapat meningkatkan efisiensi teknis petani dibandingkan dengan sistem sewa tetap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani setempat bahwa adanya kesenjangan yang sangat besar antara unit lahan yang tersedia untuk digarap dengan jumlah petani yang berminat menggarap lahan milik orang lain merupakan tantangan utama apabila petani berkeinginan menambah luas lahan garapan dengan sistem bagi hasil. Situasi yang tidak menguntungkan ini acapkali dimanfaatkan pemilik lahan untuk menekan petani penggarap. Tidak jarang pemilik lahan dengan semena-mena menentukan sistem bagi hasil sesuai keinginannya sendiri secara sepihak dan harus dipatuhi petani penggarap. Begitu petani penggarap tidak mematuhi ketentuan tersebut, maka hak atas lahan garapan langsung dialihkan kepada petani penggarap yang lain. Fakta inilah yang menjadikan kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap cenderung merugikan petani penggarap. Hal ini sejalan dengan temuan (Braidó, 2008) yang mengemukakan petani penggarap hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan marginal, yang mengarah pada produktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan lahan yang dikelola oleh pemiliknya sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan hampir seluruh petani penggarap diberikan beban untuk menanggulangi terlebih dahulu semua biaya untuk kebutuhan persiapan tanam, mulai dari biaya pengolahan tanah, biaya penanaman, biaya pengadaan benih, pupuk, dan pestisida, hingga biaya pemeliharaan tanaman. Pemilik lahan pada umumnya tidak bersedia menanggulangi terlebih dahulu biaya-biaya tersebut. Sebetulnya, sebagian biaya yang dikeluarkan tersebut akan diperhitungkan dan dikembalikan lagi kepada petani penggarap sesaat sebelum dilakukan bagi hasil dengan pemilik lahan. Sekilas tampak tidak begitu merugikan dari aspek usahatani. Namun masalahnya adalah untuk menanggulangi semua beban biaya tersebut, petani penggarap tidak memiliki kemampuan finansial karena modalnya sangat terbatas. Solusi yang ditempuh petani selama ini yakni membangun relasi dengan tengkulak. Melalui tengkulak, petani meminjam uang meskipun bunganya cukup tinggi, berkisar 30-40%. Hal ini sejalan dengan temuan (Yuniar et al., 2026) yang menyatakan bahwa relasi antara petani dengan tengkulak terbentuk tidak sebatas karena ketergantungan finansial, tetapi dipertahankan melalui pertukaran manfaat, kepercayaan, dan interaksi yang berlangsung secara berkelanjutan.

Pinjaman uang tunai yang diperoleh petani penggarap dari tengkulak, selanjutnya digunakan sebagai modal usahatani termasuk untuk pembiayaan penebusan pupuk bersubsidi di kios pengecer. Bila dikaji lebih jauh, penggunaan uang pinjaman dengan bunga cukup tinggi untuk biaya penebusan pupuk bersubsidi berdampak kontra produktif dengan tujuan diadakannya subsidi pupuk. Di satu sisi, pemerintah memberikan subsidi pupuk untuk mengurangi beban biaya petani dalam pengadaan pupuk. Namun di sisi lain, petani justru terbebani utang dengan bunga yang cukup tinggi untuk pengadaan pupuk bersubsidi tersebut. Fakta ini berimplikasi pada efektivitas subsidi pupuk pemerintah yang rendah. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas subsidi pemerintah dapat dibagi dalam tiga kategori yakni tinggi (37,50%), sedang (28,33%), dan rendah (34,17%). Kombinasi efektivitas subsidi pupuk pemerintah, skala penguasaan lahan dan pola penguasaan lahan ternyata memiliki hubungan yang positif dan sangat signifikan dengan kemiskinan petani (Tabel 3). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa petani dengan kategori penguasaan lahan berskala kecil, pola penguasaan lahan sebagai petani penggarap, dan efektivitas subsidi pupuk tergolong rendah, secara umum kondisi tersebut cenderung menjadikan petani miskin, demikian sebaliknya.

Mengacu pada temuan di atas, dipandang perlu adanya regulasi dari pemerintah untuk membantu petani agar terhindar dari kemiskinan. Regulasi paling mendasar yang perlu diadakan adalah regulasi pola penguasaan lahan sistem bagi hasil yang adil. Adil artinya saling menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil yakni pihak pemilik lahan dan pihak petani yang bertindak sebagai penggarap lahan. Regulasi ini dianggap penting karena pola penguasaan lahan sistem bagi hasil selama ini memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan pertama, pembebanan biaya usahatani yang memberatkan petani. Petani penggarap acapkali harus menalangi terlebih dahulu seluruh beban biaya usahatani pada saat persiapan musim tanam. Pemilik lahan pada umumnya tidak bersedia menalangi beban biaya tersebut. Kondisi inilah yang menjadikan petani penggarap kadangkala tidak punya pilihan selain berutang ke tengkulak dengan bunga mencapai 30-40 persen. Petani penggarap terpaksa berutang karena tidak memiliki modal atau memiliki modal namun jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan biaya yang harus ditalangi. Sebenarnya, sebagian beban biaya yang ditanggung petani tersebut diperhitungkan dan dikembalikan kepada pihak petani sesaat sebelum dilakukan pembagian hasil dengan pemilik lahan. Namun demikian, akumulasi beban biaya termasuk bunga utang yang tinggi dan harus dilunasi, secara otomatis menggerus dan mengurangi jumlah pendapatan yang diterima petani pada saat pembagian hasil dengan pemilik lahan.

Kelemahan kedua, risiko kerugian usahatani karena gagal panen atau produksi rendah akibat adanya bencana alam (kekeringan dan banjir) atau serangan hama dan penyakit yang eksplosif hanya ditanggung oleh petani penggarap. Pemilik lahan kebanyakan tidak bersedia untuk berbagi dengan petani penggarap menanggung kerugian tersebut. Kondisi yang tidak menguntungkan inilah yang menjadikan pendapatan petani penggarap selalu berada dalam posisi ketidakpastian usaha yang tinggi. Solusi yang ditawarkan pemerintah selama ini adalah petani diajak bergabung menjadi peserta program asuransi usahatani padi (AUTP). Kendalanya adalah petani kesulitan membayar premi asuransi karena modalnya sangat terbatas (Halim et al., 2022).

Kelemahan ketiga, proporsi pembagian hasil yang tidak adil. Proporsi pembagian hasil yang diterapkan selama ini secara umum adalah 60:40 atau 50:50. Proporsi ini tidak

ditentukan berdasarkan kontribusi beban biaya dan risiko kerugian yang dihadapi, melainkan hanya mengikuti kebiasaan dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Padahal, bila dihitung, kontribusi pembiayaan yang ditanggung petani penggarap cukup tinggi, mulai dari kontribusi tenaga kerja hingga subsidi pupuk yang diterima dari pemerintah dan selama ini tidak pernah diperhitungkan. Jadi, bila dilakukan kalkulasi lebih jauh tampak bahwa bagian hasil yang diterima petani penggarap terbukti lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang digunakan dalam pengelolaan usaha tani pada setiap musim tanam (Irmayanti, 2010); (Priyadi & Ash Shidiqie, 2015); (Mokodongan et al., 2016); (Auliyah & Wulandari, 2017). Akibatnya, pendapatan riil yang diterima petani penggarap pada satuan luasan lahan yang sama cenderung lebih rendah dibandingkan pendapatan petani pemilik penggarap, dan pendapatan petani penyewa/gadai (Damayanti, 2022); (Hadiana, 2017); (Puspitasari et al., 2020).

Kelemahan keempat, efektivitas subsidi pupuk pemerintah yang tergolong rendah. Kondisi ini terjadi karena nilai subsidi pupuk pemerintah selama ini tidak diperhitungkan dan tidak dikembalikan kepada petani penggarap sesaat sebelum dilakukan pembagian hasil dengan pemilik lahan. Padahal, nilai subsidi pupuk pemerintah yang dibagikan khususnya kepada petani yang berhak menerima bisa mencapai Rp 1,0 juta per hektar per musim tanam. Jadi, sebenarnya tanpa disadari petani kehilangan sumber pendapatan potensial sebesar Rp 1,0 juta per hektar setiap musim tanam. Nilai kehilangan pendapatan ini justru mengalir 50,0 persen (bila proporsi 50:50) atau 40,0 persen (bila proporsi 60:40) ke pemilik lahan, baik berupa dalam bentuk gabah kering panen atau uang tunai pada saat dilakukan pembagian hasil. Nilai ini tentunya semakin meningkat seiring dengan bertambahnya penguasaan lahan petani. Fakta inilah yang menjadikan efektivitas subsidi pupuk pemerintah sebagian masih berada pada kategori rendah hingga sedang.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun rancangan regulasi pola penguasaan lahan sistem bagi hasil yang adil, baik dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan bupati. Adapun beberapa ketentuan penting yang harus termuat dalam regulasi tersebut yakni perjanjian penguasaan lahan dengan pola bagi hasil sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis, tidak hanya lisan saja, memuat butir-butir klausul yang terperinci dan jelas antara hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama dalam hal pembagian beban biaya dan proporsi pembagian hasil, termasuk jangka waktu perjanjian bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak, baik pihak pemilik lahan maupun pihak petani penggarap. Ketentuan perjanjian bagi hasil idealnya diketahui pemerintah setempat sehingga pemilik lahan dan petani penggarap memiliki kedudukan yang setaraf. Pemilik lahan tidak lagi berada dalam posisi superior dan dapat bertindak semena-mena terhadap petani penggarap seperti salah satunya tindakan pemutusan perjanjian bagi hasil secara sepihak. Melalui regulasi ini diharapkan dapat menjadi stimulan bagi petani agar termotivasi meningkatkan produksi dan pendapatan mereka sehingga bisa terhindar dari kemiskinan.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel mencakup efektivitas subsidi pupuk pemerintah, skala dan pola penguasaan lahan petani secara bersama-sama terbukti memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kemiskinan petani. Akan tetapi, secara parsial variabel efektivitas

subsidi pupuk pemerintah memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan kemiskinan petani. Secara umum, terdapat kecenderungan petani yang tergolong miskin adalah petani yang penguasaan lahannya hanya menggunakan pola bagi hasil (petani penggarap), luasannya berskala sempit (kurang dari 0,50 ha), dan subsidi pupuk pemerintah yang diterima memiliki efektivitas manfaat yang rendah. Petani yang mampu menguasai lahan hingga mencapai skala luas (lebih besar dari 1,00 ha) melalui penguasaan lahan milik sendiri dan penguasaan lahan milik orang lain dengan pola bagi hasil (petani pemilik penggarap), terbukti memiliki tingkat pendapatan cenderung lebih besar dari Rp 475.861 per kapita per bulan atau berada diatas garis kemiskinan (tidak miskin).

Perlu adanya regulasi terkait penguasaan lahan dengan pola bagi hasil, berupa peraturan daerah atau peraturan bupati, agar subsidi pupuk pemerintah memiliki efektivitas manfaat yang tinggi, khususnya bagi petani yang berhak menerimanya, guna memotivasi petani untuk meningkatkan produksi dan pendapatannya melalui pemanfaatan lahan secara optimal sehingga mereka dapat terhindar dari kemiskinan.

## **Daftar Pustaka**

- Auliyah, R., & Wulandari, A. (2017). *Potret Bagi Hasil Pertanian*. Deepublish.
- BPS Indonesia. (2023). *Statistik Indonesia 2023* (Vol. 1101001). Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.
- BPS Indonesia. (2025). *Statistik Indonesia 2025*. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.
- BPS Takalar. (2024). *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023: Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Tanaman Pangan Kabupaten Takalar*. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Takalar.
- BPS Takalar. (2025a). *Kabupaten Takalar Dalam Angka 2025*. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Takalar.
- BPS Takalar. (2025b). *Statistik Daerah Kabupaten Takalar 2025*. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Takalar.
- Braido, L. H. B. (2008). *Evidence on the Incentive Properties of Share Contracts*. 51, 327–349.
- César, S. (2024). Technical efficiency, production risk and sharecropping. *Latin American Economic Review*. <https://doi.org/https://doi.org/10.60758/laer.v31.63>
- Damayanti, U. (2022). Analisis Perbandingan Pendapatan dan Keuntungan Usahatani Padi (*Oryza sativa*) Petani Pemilik Penggarap dan Petani Penyakap (Studi Kasus di Desa Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Ilmu Pertanian Agronitas*, 4(1), 216–223.
- Faisal, M., & Halim, A. (2022). Analisis Hubungan Penguasaan Lahan Dan Pola Bagi Hasil Dengan Tingkat Kemiskinan Petani Penggarap. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 4(1), 11–22. <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i1.2636>

- Ginting, J. (2004). *Analisis Faktor Penyebab Pendapatan Petani Miskin di Kecamatan Deli Tua TE SIS*.
- Hadiana, D. (2017). Analisis efisiensi faktor produksi dan pendapatan usahatani padi sawah dengan sistem bagi hasil (suatu kasus di Desa Kirisik Kecamatan Jatininggal Kabupaten Sumedang). *Jurnal Ilmu Pertanian Dan Peternakan*, 5(2), 119–129.
- Halim, A. (2026). Economic Engineering of the Profit-Sharing System as an Effort to Improve the Welfare of Rice Farmers in Pinrang Regency. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 14(1), 65–76. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v14i1.4480>
- Halim, A., Razak, R., & Nain, U. (2022). The Relationship between the Knowledge Level of Farmers and the Effectiveness of the Rice-Farming Business Insurance Program (AUTP) in Pinrang Regency .... *Journal of Social Science and ...*, 02(07), 298–307. [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/748/1/10ijssers-The Relationship between the Knowledge Level of Farmers and the.....pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/748/1/10ijssers-The%20Relationship%20between%20the%20Knowledge%20Level%20of%20Farmers%20and%20the.....pdf)
- Handayani, N. P., Rahmanelli, R., & Wilis, R. (2018). Strategi Bertahan Hidup Petani Penggarap Padi Sawah di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. *Jurnal Geografi*, 7(1), 93. <https://doi.org/10.24036/geografi/vol7-iss1/199>
- Irmayanti. (2010). *Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Petani Penggarap Usahatani Lahan Sawah di Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros* (pp. 1–131).
- Khomsan, A. ., Dharmawan,, Saharuddin,, Syarieff,, & Sukandar. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lubis, D., & Indrawati, I. R. (2017). Analisis pendapatan petani penggarap dengan akad. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam-Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017*, 2(3), 310–315.
- Manatar, Laoh, & Mandei. (2017). *Pengaruh Status Penguasaan Lahan Terhadap Pendapatan Petani Padi di Desa Tumani, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan*. 13, 55–64.
- Martono, N. (2010). *Statistik Sosial, Teori dan Aplikasi Program SPSS*. Gava Media.
- Mokodongan, A., Rauf, R. A., & Laapo, A. (2016). Analisis Pendapatan Petani Penggarap. *E-J. Agrotekbis*, 4(3), 310–315.
- Mufti, M., & Zargustin, D. (2018). PENGUASAAN LAHAN USAHATANI PADI SAWAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN TINGKAT PEMISKINAN DI DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR. *Jurnal Agribisnis*, 19(1), 26–32. <https://doi.org/10.31849/agr.v19i1.892>
- Priyadi, U., & Ash Shidiqie, S. J. (2015). Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah studi di Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Millah*, XV No 1, 101–115. [www.regionalinvestment.bkpm.go.id](http://www.regionalinvestment.bkpm.go.id)

- Puspitasari, N., Bela, S. R., & Prasetyaningtiyas, S. (2020). Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen MUZARA'AH PADA USAHA PERTANIAN PADI: ANALISIS NILAI-NILAI ISLAMI. *Bisma*, 14(1), 70–81. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA>
- Sugiyarto, S., Mulyo, J. H., & Seleky, R. N. (2016). KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BOJONEGORO. *Agro Ekonomi*, 26(2), 115. <https://doi.org/10.22146/agroekonomi.17264>
- Susilowati, S. H., & Maulana, M. (2012). Luas Lahan Usahatani dan Kesejahteraan Petani : Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria Farm Business Land Size and Farmers ' Welfare : Smallholders ' Existence and Agrarian Reform Urgency Lahan pertanian dewasa ini menghadapi tanta. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10(1), 17–30.
- Tenriawaru, A. N., Arsyad, M., Amiruddin, A., Viantika, N. M., & Meilani, N. H. (2021). Analisis dan Determinan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) di Provinsi Sulawesi Selatan. *AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension*, 45(2), 146. <https://doi.org/10.20961/agritexts.v45i2.57364>
- Ulfa, F., Faroka, G., Afandi, A. D., Muslihah, S., & Septiana, P. (2023). Penyuluhan Pembuatan Pupuk Eco-Enzym di Dusun Sirembes Desa Kaliwuluh. *Jurnal Bina Desa*, 5(1), 27–32. <https://doi.org/10.15294/jbd.v5i1.40980>
- Yuniar, P., Bakri, R., Demmallino, E. B., & Amrulllah, A. (2026). Analisis Relasi Antara Petani dan Tengkulak Dalam Usahatani Jagung Hibrida. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (JSEP) UNHAS*, 22(2), 203–212.